



PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGANYAR

LKJIP

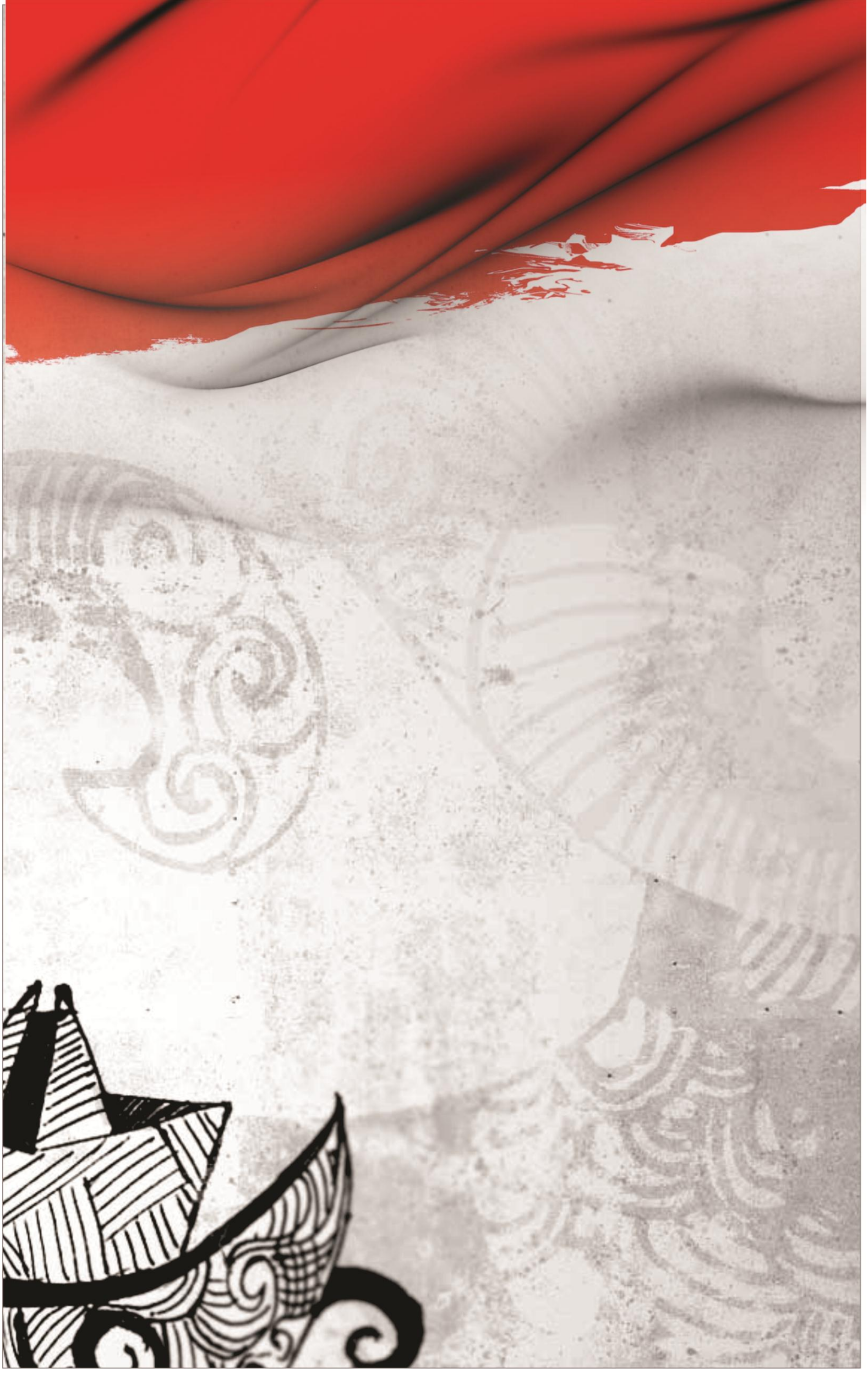
Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl.Lawu No.85 Telp (0271) 495038 No.Fax : (0271) 494835



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

Dengan disusunnya LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Karanganyar terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam membantu Bupati untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

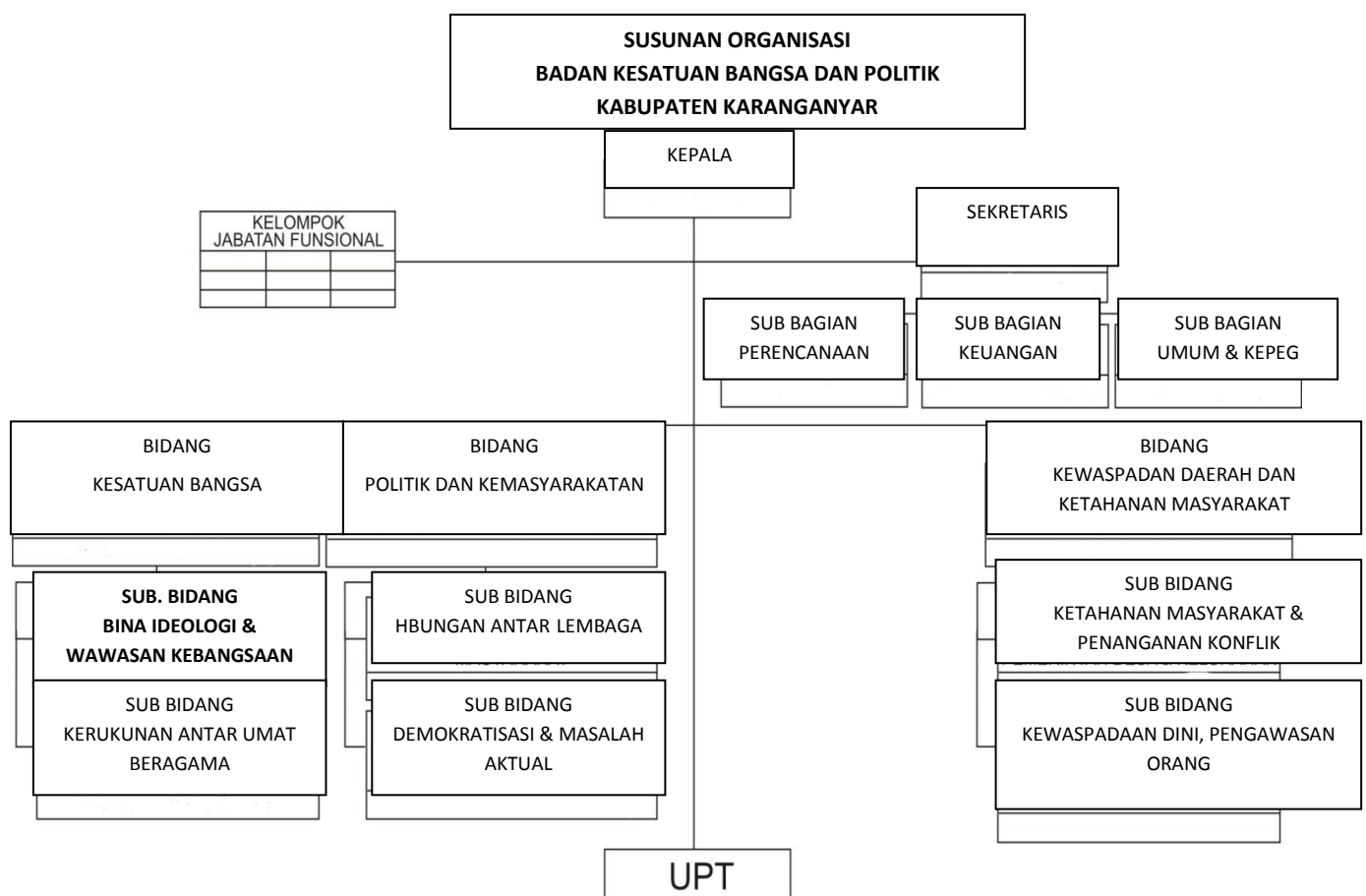
1. Merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
5. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Badan.
6. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan memberdayakan kesatuan dan kerukunan masyarakat daerah yang kondusif.
7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai nilai kebangsaan, pemberdayaan kesatuan dan kerukunan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, politik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan situasi daerah yang kondusif.

8. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
9. Melaksanakan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintahan daerah, DPRD, lembaga politik dan kemasyarakatan lainnya.
10. Menyelenggarakan koordinasi musyawarah di daerah.
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan daerah, dan ketahanan kemasyarakatan.
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Karanganyar

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan PERDA No.9 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu unsur pelaksana urusan wajib pemerintahan, yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011.

Dengan adanya Perda No 9 tahun 2011 maka komposisi jabatan sesuai Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
 - a) Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b) Sub Bidang Kerukunan antar Umat Beragama dan Aliran Penghayat Kepercayaan
4. Bidang Politik dan Kemasyarakatan membawahi :
 - a) Sub Bidang Hubungan antar Lembaga
 - b) Sub Bidang Demokratisasi dan Masalah Aktual
5. Bidang Perlindungan masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik
 - b) Sub Bidang Kewaspadaan dini, Pengawasan orang dan Lembaga Asing
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kepegawaian

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar bulan Desember 2019 sebanyak 35 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 22 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 13 orang tenaga kontrak. Dari 35 orang pegawai tersebut, sebanyak 26 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karanganyar Menurut Struktur dan Bidang

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	-
1. Sub Bagian Perencanaan	1
2. Sub Bagian Keuangan	3
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1
1. Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Aliran Penghayatan Kepercayaan	2
2. Sub Bidang Bina Idiologi dan Wasbang	1
Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan	-
1. Sub Bidang Demokratisasi dan Masalah Aktual	3
2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	2
Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah & Ketahanan Masyarakat	1
1. Sub Bidang Kewaspadaan dini, Pengawasan orang dan Lembaga Asing	1
2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	2

b. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 22 orang PNS yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, sebanyak 7 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 12 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 1 orang berpendidikan Diploma 3, dan 2 orang berpendidikan SLTA.

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	7
Strata 1	12
Diploma 3	1
SLTA	2
Total	22

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian dari 22 orang PNS, terdiri dari Golongan II 1 orang; Golongan III 18 orang; Golongan IV 6 orang;

Tabel . 2.3
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	2	IV/a	6
II/b	-	III/b	1	IV/b	0
II/c	-	III/c	3	IV/c	1
II/d	1	III/d	8	IV/d	
	1		14		7

3. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis yang mendukung pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

a. Kekuatan.

- Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan/ politik
- Banyaknya organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ikut mendorong pembangunan Kesatuan Bangsa.
- Adanya perangkat hukum yang dapat mendorong berjalannya proses politik baik nasional maupun daerah.

b. Kelemahan

- Adanya keinginan sekelompok kecil masyarakat yang dalam berdemokrasi tanpa memperhatikan dasar hukum
- Dinamika masyarakat di era transisi dan globalisasi memudahkan gejala ketidakseimbangan sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan

c. Peluang

- Adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi lingkungannya.
- Terlaksananya kesadaran berbangsa dan bernegara yang mengarah pertumbuhan demokrasi yang sehat

d. Tantangan

- Adanya aktifitas politik dalam skala nasional
- Masih kurangnya pemahaman aparat tentang upaya perlindungan masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan unit kerja dari Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar.

1. Visi

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar. Visi merupakan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dibawa dan diarahkan agar dapat melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya. Berdasarkan pada kondisi nyata, dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan maka visi Badan Kesatuan Bangsa Politik adalah : **“Terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam menjalin Persatuan dan Kesatuan”**.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, adapun misi badan Kesatuan Bangsa dan Poilitik Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada misi pertama, kedua dan ketiga Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemahaman ideologi Pancasila;
- b. Mewujudkan ketentraman yang demokratis dalam berpolitik
- c. Mewujudkan ketahanan bangsa yang mantab di daerah
- d. Mengembangkan kewaspadaan nasional di daerah

3. Tujuan dan Sasaran

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder dalam bela Negara;
- b. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat;
- c. Meningkatnya kemampuan aparat, dukungan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja OPD.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan agar dapat di formulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman		Persentase pengendalian kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder dalam bela negara	Persentase masyarakat yang mengikuti bela negara	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Persentase FKUB aktif	75	80	82	85	88	90
	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	78	79	80	80	80	80
	Meningkatnya	Nilai AKIP OPD	48	48	60	60,50	61	61,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	kemampuan aparat, dukungan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja OPD							

B. Perencanaan Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019. Alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 5.998.270.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.651.970.000,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 2.346.300.000,- .

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, indikator, target, program kegiatan dan anggaran yang telah disepakati antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder dalam bela negara	Persentase masyarakat yang mengikuti bela negara	0,5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.080.000.000
			1. Pemantauan orang asing	20.000.000
			2. Piket posko siaga	108.000.000
			3. Pemantauan organisasi terlarang	30.000.000
			4. Fasilitasi keamanan	400.000.000

	umum	
	5. Fasilitas peran dan fungsi FKDM	50.000.000
	6. Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP	150.000.000
	7. Penanganan Konflik Sosial	126.000.000
	8. Peningkatan Kewaspadaan Daerah	196.000.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	190.000.000
	1. Fasilitas Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	15.000.000
	2. Fasilitas Hubungan Kerja FPBI	75.000.000
	3. Peningkatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100.000.000
	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	220.000.000
	1. Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme	50.000.000
	2. Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila	30.000.000
	3. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	90.000.000
	4. Fasilitas ormas dan LSM	50.000.000

Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	79	Program Pendidikan Politik Masyarakat	200.000.000
			1. Asistensi bantuan parpol	15.000.000
			2. Pembinaan Ormas dan LSM	25.000.000
			3. Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan pilkada di daerah	100.000.000
			4. Fasilitasi pelaksanaan hibah kepada lembaga/ instansi/ organisasi/ kemasyarakatan	15.000.000
			5. Sosialisasi Pemilu dan Pilkada	45.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian (Assesment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2019, antara lain :

1. Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder dalam Bela Negara

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Persentase masyarakat yang mengikuti Bela Negara dan Persentase FKUB aktif. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder dalam Bela Negara

No.	Indikator Kinerja	Real. 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2019)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019)
			Target	Real	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase masyarakat yang mengikuti Bela Negara	0,5%	0,5%	0,5%	100%	0,5%	100%
2.	Persentase FKUB aktif	75%	80%	85%	106,25%	80%	132,81%
Persentase Capaian Sasaran Strategis 1					103,12%		116.4%

Secara umum capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan kesadaran aparat dan stakeholder dalam Bela Negara tercapai 103,12% atau kategori Sangat Baik. Untuk indikator Persentase masyarakat yang mengikuti Bela Negara tercapai 100% dan Persentase FKUB aktif tercapai 85%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 sudah efektif dan efisien.

Capaian kinerja tahun 2019 pada sasaran strategis 1 apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai 116,4%.

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp.1.338.510.050,- atau 89,83% dari total pagu anggaran

Rp.1.490.000.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 151.489.950,- atau 10,17%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.080.000.000	1.047.529.550	97
1. Pemantauan orang asing	20.000.000	16.820.500	84
2. Piket posko siaga	108.000.000	108.000.000	100
3. Pemantauan organisasi terlarang	30.000.000	29.298.250	98
4. Fasilitasi keamanan umum	400.000.000	395.060.750	99
5. Fasilitasi peran dan fungsi FKDM	50.000.000	45.989.500	92
6. Fasilitasi PAM kunjungan tamu VVIP & VIP	150.000.000	147.539.500	98
7. Penanganan Konflik Sosial	126.000.000	119.889.550	95
8. Peningkatan Kewaspadaan Daerah	196.000.000	184.931.500	94
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	190.000.000	166.599.500	88
9. Fasilitasi Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	15.000.000	12.289.000	82
10. Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI	75.000.000	60.296.300	80
11. Peningkatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100.000.000	94.014.200	94
Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	220.000.000	124.381.000	57
12. Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme	50.000.000	49.732.000	99
13. Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila	30.000.000	29.206.250	97
14. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	90.000.000	0	0
15. Fasilitasi ormas dan LSM	50.000.000	45.442.750	91

2. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 2, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Real. 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2019)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	78%	79%	79%	100%	79%	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2					100%		100%

Capaian kinerja indikator pada sasaran strategis 2 : Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat tercapai 100% atau kategori Baik. Hal ini diukur dari indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 sudah efektif dan efisien.

Capaian kinerja tahun 2019 pada sasaran strategis 2 apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai 100%.

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat adalah sebesar Rp.152.805.690,- atau 76% dari total pagu anggaran 200.000.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 47.194.310,- atau 24% dari pagu yang ditentukan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	200.000.000	152.805.690	76
1. Asistensi bantuan parpol	15.000.000	7.187.750	48
2. Pembinaan Ormas dan LSM	25.000.000	23.658.000	95
3. Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan pilkada di daerah	100.000.000	62.550.990	63
4. Fasilitasi pelaksanaan hibah kepada lembaga/ instansi/ organisasi/ kemasyarakatan	15.000.000	14.508.950	97
5. Sosialisasi Pemilu dan Pilkada	45.000.000	44.900.000	99

B. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	451.296.000	437.204.515	97%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000	39.501.159	82,29%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.300.000	6.743.450	72,51%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	113.954.000	113.954.000	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000	22.000.000	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.145.000	19.145.000	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.777.000	3.769.500	99,80%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.120.000	3.005.000	96,31%
9	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	27.150.000	90,5%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	200,000,000	199.936.406	99,96%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.444.000	100.796.046	67%
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	122.114.000	75.719.046	62%
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.550.000	5.550.000	100%
13	Pemeliharaan komputer	19.780.000	16.527.000	83,55%
14	Pemeliharaan senjata api	3.000.000	3.000.000	100%

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.560.000	52.443.900	96%
15	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD	14.560.000	13.624.500	93,57%
16	Penyusunan Renstra OPD	40.000.000	38.819.400	97%
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.080.000.000	1.047.529.550	97%
17	Pemantauan orang asing	20.000.000	16.820.500	84,10%
18	Piket posko siaga	108.000.000	108.000.000	100%
19	Pemantauan organisasi terlarang	30.000.000	29.298.250	97,66%
20	Fasilitas keamanan umum	400.000.000	395.060.750	98,76%
21	Fasilitasi peran dan fungsi FKDM	50.000.000	45.989.500	91,98%
22	Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP	150.000.000	147.539.500	98,36%
23	Penanganan Konflik Sosial	126.000.000	119.889.550	95,15%
24	Peningkatan Kewaspadaan Daerah	196.000.000	184.931.500	94,35%
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	190.000.000	166.599.500	88%
25	Fasilitasi Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	15.000.000	12.289.000	81,93%
26	Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI	75.000.000	60.296.300	80,39%
27	Peningkatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100.000.000	94.014.200	94,01%
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	220.000.000	124.381.000	57%
28	Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Nasionalisme	50.000.000	49.732.000	99,46%
29	Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila	30.000.000	29.206.250	97,35%
30	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	90.000.000	0	0%
31	Fasilitasi Ormas dan LSM	50.000.000	45.442.750	90,88%
	Program pendidikan politik masyarakat	200.000.000	152.805.690	76%
32	Asistensi bantuan parpol	15.000.000	7.187.750	47,91%
33	Pembinaan Ormas dan LSM	25.000.000	23.658.000	94,63%
34	Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan pilkada di daerah	100.000.000	62.550.990	62,55%
35	Fasilitasi pelaksanaan hibah kepada lembaga/ instansi/ organisasi/ kemasyarakatan	15.000.000	14.508.950	96,73%
36	Sosialisasi Pemilu dan Pilkada	45.000.000	44.900.000	99,78%

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder dalam Bela Negara	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.080.000.000	1.047.529.550	97
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	190.000.000	166.599.500	88
	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	220.000.000	124.381.000	57
Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	200.000.000	152.805.690	76
JUMLAH TOTAL		1.690.000.000	1.491.315.740	88,24%

Pagu anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 1.690.000.000,- konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.491.315.740,- atau 88,24% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.198.684.260,- atau 11,76%.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai jabaran Renstra untuk menuju Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang secara bertahap diwujudkan dalam misi melalui program kerja Tahun 2019. Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terdiri dari 5 (lima) program, yaitu Program : Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengembangan wawasan Kebangsaan, Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Pendidikan Politik Masyarakat. Kelima program tersebut dilaksanakan dengan 36 kegiatan serta dengan dukungan dana dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder dalam Bela Negara sebesar 103,12% (Sangat Baik)
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat sebesar 100% (Baik)

B. Permasalahan/ Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Kurangnya kompetensi dan kualifikasi SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Keterlambatan dalam siklus penetapan anggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam memulai pelaksanaan kegiatan

3. Keterlambatan pada penetapan perubahan beberapa indeks belanja terutama yang mengalami kenaikan sehingga menyebabkan kesan yang kurang matang dalam perencanaan anggaran

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi staf dengan mengikuti bintek, diklat, dan pelatihan serta memudahkan pemberian rekomendasi bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung pewujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

Agus Cipto Waluyo, SH., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610822 198903 1 006